



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, RISTEKDIKTI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Pariwisata RI.
Hari/Tanggal	: Selasa, 01 September 2015.
Pukul	: 21.20 – 23.45 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Teuku Riefky Harsya, M.T./Ketua Komisi X DPRRI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset Komisi X DPRRI.
Acara	: 1. Pembahasan Realisasi APBN 2015; 2. Lain-lain.
Hadir	: 31 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Menteri Pariwisata RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 21.20 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI/Teuku Riefky Harsya, M.T., setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pariwisata RI serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. REALISASI PELAKSANAAN APBN 2015.

1. Komisi X DPR RI memahami realisasi pembayaran anggaran 2015 di Kemenpar RI per 24 Agustus 2015 sebesar 17,8% (EOY) atau sebesar 39,3% (YTD) yang dipengaruhi oleh:
 - a. Perubahan organisasi/nomenklatur berakibat pada penyesuaian kembali atas program dan anggaran.
 - b. DIPA awal Tahun 2015 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya mengingat dikeluarkannya surat Kementerian Keuangan, antara lain Surat Menteri Keuangan Nomor S-762/MK/2014 tanggal 14 November 2014 tertulis “Kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur, anggaran dapat dicairkan hanya komponen 001 (pembayaran gaji dan tunjangan)”.

- c. Rencana penyerapan anggaran yang telah disusun mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan kembali dengan organisasi baru.
 - d. Ada periode *cut off* pada organisasi dari nomenklatur lama periode Mei dan Juni 2015 untuk pelaksanaan anggaran dengan DIPA baru.
 - e. DIPA Kementerian Pariwisata RI telah sesuai dengan struktur organisasi yang baru ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2015.
2. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemenpar RI atas upaya yang ditempuh untuk mengotimalisasikan penyerapan anggaran diantaranya dengan melaksanakan percepatan proses pengadaan barang/jasa dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara rutin dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang/jasa.

B. LAIN-LAIN.

1. Aspek Pemasaran Pariwisata.
 - a. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas angka kunjungan wisman periode Januari – Juni 2015 mengalami kenaikan sebesar 2,34%, sementara untuk Malaysia mengalami penurunan sebesar 8,58% begitu pula dengan Singapura mengalami penurunan sebesar 3,43%.
 - b. Kemenpar perlu menyiapkan standard pemasaran pariwisata manca negara yang berbasis budaya Indonesia.
 - c. Kemenpar perlu mempertimbangkan strategi pemasaran dalam bentuk *Meeting Incentives Confrence and Exhibition* (MICE) untuk meningkatkan target kunjungan wisatawan.
 - d. Komisi X DPR RI memerlukan peta jalan terhadap metode pemasaran dengan pendekatan *Destination, Origination and Timeline* (DOT), *Branding, Advertising, Selling* (BAS), dan *Paid Media, Owned Media, Social Media* (POS), termasuk pula format pengalokasiannya per program utama yaitu pengembangan destinasi, pengembangan pemasaran, dan pengembangan kelembagaan.
2. Aspek Destinasi.
 - a. Dengan adanya kebijakan bebas visa dapat meningkatkan jumlah wisman, namun perlu dihitung secara cermat tidak hanya penghasilan devisa negara tetapi juga sisi negatif yang mungkin akan timbul di kemudian hari, dan sejauhmana keterlibatan daerah maupun masyarakat memperoleh manfaat atas pariwisata tersebut.
 - b. Infrastruktur perlu disiapkan secara memadai dan masih perlunya pengembangan destinasi yang nyaman dan aman sesuai dengan standar kepariwisataan internasional.
3. Aspek Kelembagaan Pariwisata, target peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tidak hanya mengedepankan promosi pariwisata tetapi perlu menyiapkan dan mengembangkan sumber daya (termasuk SDM) yang unggul dalam rangka mensukseskan kepariwisataan Indonesia.

4. Aspek Industri Pariwisata, Kemenpar perlu melakukan kerjasama dengan K/L atau industri kepariwisataan untuk mengembangkan industri pariwisata.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 23.45 WIB.

KETUA,



TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.